

Angel fix

by fadli 99

Submission date: 09-Dec-2021 10:03AM (UTC-0500)

Submission ID: 1724932083

File name: jurnal_skripsi_elvira.docx (107.13K)

Word count: 8854

Character count: 57266

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN UANG BERBASIS APLIKASI
ATAU PINJAMAN ONLINE**

Elvira Angelia Mangori kadembo

angelkadembo@gmail.co.id

087852325687

Widhi Cahyo Nugroho, S.H.,M.Hum.

081234226200

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Akhir-akhir ini banyak orang yang membicarakan fintech. Khusus tahun ini, kehadiran bisnis fintech dalam menawarkan barang-barang moneter berbasis komputerisasi tampaknya membuka pintu masuk baru bagi individu yang perlu mengajukan uang muka. Akomodasi dan akal sehat yang dihadirkan oleh kemajuan online, tidak sedikit membuat orang terpicat untuk memanfaatkan produk promosi berbasis web ini. Memang jika dibandingkan dengan KPR standar, kredit online memiliki biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan porsi tenor yang lebih terbatas. Pada kredit berbasis web, biaya organisasi tidak mudah. Dengan demikian, klien berada dalam bahaya membayar kewajiban yang lebih menonjol daripada pemahaman yang mendasarinya. . Kehadiran kredit berbasis web ini menjadi tanda tanya mengingat masih rendahnya kemampuan moneter masyarakat Indonesia. Kata kunci : fintech, pinjol , debitur , suku bunga

Abstract

in the recent decade, financial technologies (fintech) becomes so popular. Giving a new options for peoples in addition to fulfill daily needs. Thus so easy to get money from fintech, even it have bigger loan interest. Many new problems comes after it, people can't payback the money.

1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan kadang-kadang tidak diragukan lagi telah mendorong perubahan penting dalam kemajuan inovasi data dan korespondensi. TIK menggabungkan dua sudut, menjadi inovasi data spesifik dan inovasi korespondensi. Inovasi data menggabungkan segala sesuatu yang diidentifikasi dengan siklus, digunakan sebagai instrumen, kontrol, dan pelaksana data. Sedangkan inovasi surat menyurat ialah semua bagian telah diidentikkan melalui pemanfaatan perangkat guna mengkaji juga memindahkan informasi mulai dari satu gadget kemudian ke gadget berikutnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, orang-orang masih mengenal administrasi pos, telepon, mesin tik, atau kabel, jadi sekarang semuanya sudah mulai sepi. Seiring dengan kemajuan pesat dan peningkatan inovasi, individu kini telah beralih menggunakan ponsel, tablet, web, dan berbagai gadget modern lainnya. Sulit membayangkan bagaimana masyarakat maju ini dapat hidup tanpa perangkat atau asosiasi web. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kini membawa kita pada era digital 4.0 yang telah membawa kita kepada suatu titik dimana perkembangan dunia maya menjadi ruang yang semakin nyata dalam

kehidupan sehari-hari. misalnya, pertemuan tatap muka yang bisa dilakukan meski terpisah jarak ribuan kilometer dapat dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi online.¹

Berkembangnya bentuk dunia baru, juga memunculkan berbagai jenis usaha baru. Salah satunya adalah startup. Startup adalah organisasi atau bisnis yang baru-baru ini dibingkai. Organisasi-organisasi ini biasanya masih selama waktu yang dihabiskan untuk membuat dan mengeksplorasi untuk melacak pasar yang tepat. Bagaimanapun, di samping peningkatan inovasi yang semakin kompleks, semakin banyak bisnis baru berbasis inovasi telah muncul. Perkembangan perusahaan baru di Indonesia bisa dibilang sangat cepat. Secara konsisten dan mengejutkan secara konsisten banyak pencetus (pemilik) startup baru muncul. Dengan berbagai inovasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis baru tersebut, termasuk memanfaatkan aplikasi pembukuan android. Dengan kemajuan teknologi dan dunia web baru-baru ini, semakin banyak manajer keuangan lain yang juga tertarik untuk memulai bisnis baru mereka. Saat ini bisnis baru juga disebut organisasi yang bergerak di bidang inovasi dan web. Misalnya yang tidak dapat kita temui sebelumnya, seperti Ojek Online, Konser musik Online dan berbagai jenis online lainnya. Disadari atau tidak, sedikit banyak perilaku manusia sebagai makhluk sosial sedikit bergeser, dan mungkin bergerak kearah yang lebih baik dengan pemanfaatan yang tepat. Akan lebih mudah menjalani hidup dengan berbagai jenis karya manusia kekinian yang berbasis online yang bisa kita dapati di keseharian di setiap harinya. Kemajuan zaman juga mendorong adanya kemajuan teknologi keuangan berbasis internet hal tersebut menyebabkan lahirnya *fintech/* finansial teknologi. OJK menjelaskan bahwa fintek ialah suatu terobosan di bidang industri finansial yang mengoptimalkan pemakaian teknologi.

Selama dua tahun terakhir, banyak orang yang membicarakan fintech. Khusus tahun ini, kehadiran bisnis fintech dalam menawarkan barang-barang moneter berbasis canggih tampaknya membuka pintu masuk baru bagi individu yang perlu mengajukan kredit. Daripada administrasi hipotek biasa yang disajikan oleh bank atau koperasi, fintech yang berbeda menawarkan pinjaman terdistribusi (P2P Loaning) atau uang muka online yang dapat diajukan secara efektif dan tanpa kebutuhan berbelit-belit. Karena kenyamanan dan kecepatannya, fintech menjadi sangat terkenal di kalangan milenial dan diperkirakan akan terus berkembang. Hanya menggunakan arsip catatan personal, layaknya KTP, KK, NPWP, juga bukti penggajian, apa pun bisa jadi klien lanjutan berbasis internet untuk menangani berbagai masalah keuangan. Sejujurnya, sejak aset diserahkan hingga tiba di klien, fintech hanya membutuhkan waktu hampir 24 jam. Manfaat inilah yang membuat barang-barang moneter begitu langsung bertambah di mana-mana dan semakin optimal pemakaian melalui individu-individu lewat beragam golongan.² Otoritas Administrasi Moneter (OJK) memfokuskan sekitar 75% dari populasi dewasa di Indonesia untuk dapat mengakses administrasi organisasi moneter, dan masyarakat umum semakin memanfaatkan administrasi fintech untuk mencapai tujuan moneter mereka.

Manfaat memanfaatkan fintech kredit online antara lain:

1. Siklus Sederhana

Keuntungan dari uang muka langsung berbasis web adalah bahwa siklusnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan kredit terputus yang mewajibkan konsumen guna datang ke kantor bank terjangkau awal kali guna memberikan uang muka. Cukup dengan menggunakan alat juga organisasi web, *software* kredit online bisa sesegera mungkin ditukarkan. Dengan adanya ,konsumen bisa mengestimasi limit juga tenaga tambahan mengingat interaksi akomodasi harus dimungkinkan dimana pun juga dapat sewaktu-waktu.

¹ Konadi, Win dan Dandan Irawan. 2012. Tinjauan Konseptual Kewirausahaan dalam Bisnis Pembentukan Wirausaha Baru untuk Mengatasi Pengangguran. Jurnal Ekonomika Universitas Al-Muslim Bireuen Aceh

²Kemenkeu, " Pinjaman Online", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, pada tanggal 6 oktober 2021, pukul 19:30.

2. Aset Lancar pada Beberapa Hari

Salah satu alasan mendasar orang-orang tertentu mengajukan permohonan uang muka langsung adalah karena uang muka dapat dibagikan dengan sangat cepat, yakni diantara 1-3 hari efektif. Jika konsumen telah berhasil memberikan kredit, interaksi bahkan bisa memakan waktu berjam-jam. Jadi saat konsumen pada kondisi putus asa juga memerlukan aset tak terduga, hingga saat itu uang muka online cepat ditukar, Anda bisa segera memanfaatkannya. Untuk alasan apa metode yang terlibat dengan pengeluaran cadangan cepat? Hal ini dengan alasan tidak adanya jaminan yang diberikan sehingga tidak diperlukan proses evaluasi sumber daya terlebih dahulu. Demikian juga semua informasi diberikan dengan hati-hati sehingga cenderung langsung ditangani. Ini unik dengan asumsi Anda mengajukan kredit terputus dengan mendatangi pegawai ke bank sebab informasi yang dibagikan ialah informasi aktual hingga bisa dialihkan ke informasi lanjutan supaya dapat ditangani dengan baik.

3. Prasyarat Sederhana

Kebutuhan laporan yang dibutuhkan oleh kemajuan cepat berbasis web ini hingga tidak kacau sebab dengan asumsinya konsumen perlu membagikan kredit yang bisa dengan efisien diterapkan ke seluruh konsumen.

Secara keseluruhan, kebutuhan yang diberikan bagi pemasok uang muka online ini langsung dijual secara terpisah untuk tanggung jawab KTP (Kartu Kepribadian), NPWP (Nomor Bukti Pembeda Warga), slip kompensasi atau dukungan gaji, dan rekening investasi.

Dengan syarat yang tidak membingungkan juga gampang dicukupi, siapa pun dapat memberikan permohonan langsung berbasis web.

4. Bisa Digunakan untuk Keperluan Apa Saja

Berbeda dengan berbagai tipe uang muka, layaknya KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang disajikan guna pembelian rumah, KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) yang diberikan guna pembelian transportasi motor, maupun KUR (Kredit Usaha Perorangan) yang diberikan kepada modal bisnis, uang muka online cepat ditukar. dapat digunakan untuk alasan apapun. Anda bisa memanfaatkannya untuk renovasi rumah, biaya pelatihan, biaya klinik kesehatan, hingga modal pernikahan. Namun perlu diingat, uang muka langsung berbasis internet tidak disarankan untuk membayar porsi Visa, mencicil di muka untuk membeli kendaraan atau rumah, hingga tujuan boros seperti berbelanja.³

Dekade terakhir mengenal perbankan konvensional dan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan yang dapat *mensupport* kebutuhan kita dalam segi finansial. Kini telah hadir Adakami, Kredivo, Akulaku, Paylater misalnya yang muncul sebagai perpanjangan lembaga keuangan yang hadir untuk memberikan pinjaman, baik secara langsung maupun berbentuk cicilan dengan segala ketentuan yang dibawanya. Ini menjadi khasanah baru dalam salah satu opsi alternatif kita terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi keuangan. Awalnya menjadi sebuah fase baru ketika manusia menemui kesulitan ketika membutuhkan dana instan. Bagaimana tidak, dalam hitungan menit pinjaman online akan mencairkan dana langsung ke rekening pemohon kredit. Tidak membutuhkan survey lokasi, ataupun barang sebagai jaminan atau agunan. Cukup KTP, foto dan klik-klik-klik maka uang yang diminta akan diterima konsumen tetapi kemudian, setiap hal yang baru akan memunculkan masalah yang mengikutinya. Kredit

³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3867964/ini-kelebihan-dan-kekurangan-pinjaman-online-langsung-cair>, diakses pada tanggal 6 november pukul 13:00.

atau pinjaman online menjadi sumber dari munculnya masalah baru. Suku bunga yang tinggi, dan sistem penagihan yang tidak beretika menjadi bola salju yang terus bergulir dalam kasus pinjaman online ini. Nasabah yang terlambat bayar, akan diteror – diintimidasi dan disebarluaskan kepada kalangan umum bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi. Akibatnya, nasabah akan dirugikan melalui penyebaran data oleh *debt collector* dan nama baiknya dijelekkkan dimuka umum.

Proporsi kepeloporan di Indonesia telah melampaui norma global, yaitu dua persen, namun Indonesia harus didukung lagi untuk menemukan prestasi negara-negara tetangga. Misalnya, Singapura saat ini di tujuh persen, sedangkan Malaysia di 5%. Jika ditentukan dengan jumlah masyarakat Indonesia berkisar 260 juta, Total visioner bisnis publik hingga 8,06 juta. Dijelaskan Imam Perindustrian, saat terjadi masa keresahan modern 4.0, bagiannya sudah memulai tahapan bisnis online yang diberi nama e-Brilliant IKM⁴. Ini adalah salah satu upaya penting otoritas publik untuk membuat kerangka dataset IKM yang tergabung lewat beragam pusat komersial yang sekarang berada di Indonesia. Gejolak modern 4.0 ini tentu menjadi ujian yang wajib konsumen perhatikan dengan hati-hati, contohnya lewat anggaran peningkatan IKM berdasar lanjutan,” ujarnya. Hingga dibagikan bulan Januari 2017, lebih dari 4.000 pelaku usaha telah ambil bagian dalam e-Shrewd IKM dengan total omzet Rp 1,3 miliar⁵. Kebutuhan untuk menjadi negara maju adalah jumlah visioner bisnis mesti melebihi dibanding 14% dari proporsi penduduk. Sejauh ini di Indonesia, pengusaha hanya 3,1% hingga harus ada peningkatan kecepatan dan akomodasi agar para penghibur keuangan Indonesia dapat meningkat secara signifikan. jauh, sehingga dapat bergerak menuju kebutuhan negara yang diciptakan. Juga, dengan asumsi kita fokus, ini adalah tugas otoritas publik, "kata Imam Pelaksana Isu Politik, Sah dan Keamanan.⁶

Kemudahan dan kewajaran yang ditawarkannya, tidak sedikit orang yang memanfaatkan produk pulsa online ini dengan gegabah. Memang jika dibandingkan dengan KPR biasa, kredit online memiliki biaya pinjaman yang lebih tinggi dan porsi tenor yang lebih terbatas. Pada kemajuan berbasis web, biaya organisasi tidak mudah. Dengan demikian, klien berada dalam bahaya membayar kewajiban yang lebih penting daripada pemahaman yang mendasarinya. Selain itu, klien juga harus membayar denda keterlambatan dan denda lain yang tidak masuk akal. Kehadiran kemajuan berbasis web ini menjadi pertanyaan karena rendahnya pendidikan moneter masyarakat Indonesia. Ini jelas merupakan bahaya bagi orang-orang yang berhutang uang muka online untuk terjebak dalam ikatan kewajiban yang terlalu berat untuk siap membayar bagiannya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar tiap tahunnya menimbulkan masalah baru. Sempitnya lapangan kerja yang bermuara pada kemiskinan mengharuskan setiap individu untuk berkreaitivitas untuk membuka lapangan kerja baru. Salah satu metodenya adalah melalui bantuan permodalan, yang dapat diperoleh melalui pemerintah melalui sejumlah skema, ataupun layanan *peer to peer* seperti aplikasi berbasis pinjaman online yang dapat secara mudah dan cepat digunakan. Lantas berikutnya, muncul sebuah pemikiran, bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Negara kepada nasabah yang mendapatkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pinjaman online, contoh ancaman dan teror dari *debt collector* lembaga pinjaman online. Apakah kasus ini diabaikan karena sebelum melakukan transaksi nasabah dianggap memahami *code of conduct* pada lembaga pinjaman online tersebut, atautkah nasabah mendapat payung hukum karena apa yang telah dilakukan oleh lembaga pinjaman online terhadap pelanggaran hukum yang melampaui batas. Pinjaman online

⁴ E-Smart IKM yaitu sistem database Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menyajikan profil industri, sentra dan produknya yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada. <https://indonesiabaik.id/infografis/program-e-smart-ikm>, diakses pada tanggal 6 november pukul 14:00

⁵ Siaran Pers dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Pesta Retail Nasionaldi ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/11) malam.

⁶ Wawancara dengan Menteri POLHUKAM Wiranto, laman setkab, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

yang mempunyai nilai penting tapi masih terdapat beragam bagian yang mesti dievaluasi menjadi dasar adanya penelitian yang penulis teliti.

10

2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut bisa diasumsikan beragam masalah menjadi berikut :

- 1) Bagaimana proteksi hukum untuk debitur saat pinjaman uang berbasis aplikasi (pinjaman online) ?
- 2) Bagaimana langkah negara Indonesia untuk menjamin adanya proteksi hukum untuk debitur saat pinjaman uang berbasis aplikasi (pinjaman online) ?

2. Metode Penelitian

Riset ini diimplementasikan dengan memakai teknik Hukum Normatif, Sistem Standardisasi Sah memiliki definisi yang menyertainya, suatu penelitian yang menggunakan pendekatan sumber fundamental, yang mengaitkan masalah hukum yang akan diangkat dengan menggabungkannya dengan aturan undang-undang yang ada di Wilayah Indonesia.

Sumber hukum meskipun hukum menggabungkan standar hukum dan ketertiban, perspektif dan aturan yang sah, asal-usul yang sah dan rangkaian hukum secara keseluruhan di Indonesia. Efek samping dari tinjauan ini dapat menciptakan solusi tentang perincian masalah yang akan dipertimbangkan, dalam konsentrat ini hanya memeriksa standar yang sah tanpa memeriksa praktik hukum yang ada di arena publik (*Law in Action*).

4. Pembahasan

Kemajuan teknologi keuangan berbasis internet hal tersebut menyebabkan lahirnya *fintech*/ finansial teknologi. OJK menjelaskan bahwa fintek ialah bentuk terobosan di bidang industri finansial yang mengoptimalkan pemakaian teknologi.⁷ Produk fintech umumnya berbentuk sebuah

⁷ OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke

metode yang dibentuk saat memakai sistemasi transaksi finansial yang optimal. Dalam fintek sendiri juga terdapat dua jenis fintek yaitu, fintek umum dan fintek *lending*. Fintech pada umumnya tidak terlimitasi di satu jasa budang finansial tertentu. *Fintech Lending* terlimitasi di terobosan industri finansial saat transaksi pinjam-meminjam saja⁸. Pendapat OJK, ditinjau melalui tipe penggunaannya, tipe *fintech* digolongkan pada dua kategoriyaitu, *fintech* 2.0 dan *fintech* 3.0. *Fintech* 2.0 ialah layanan finansial digital yang digunakan badan keuangan perbankan. Namun *fintech* 4.0 merunjuk ke startup teknologi yang mempunyai penawaran juga jasa terobosan finansial.

Berikut beberapa jenis fintech yang sedang berkembang:

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding maupun penggalangan dana menjadi satu diantara tipe fintech yang sekarang sering dipakai di manca negara, utamanya Indonesia. Lewat tipe fintech ini, konsumen bisa menghimpun dana juga melakukan donasi ketika sebuah inisiasi maupun program sosial yang konsumen gerakkan.

2. *Microfinancing*

Microfinancing ialah satu diantara administrasi Fintech yang menawarkan bantuan moneter untuk kelas pekerja bawah guna mengimplementasi rutinitas juga dana konsumen setiap hari. Sebagian besar kelas pekerja bawah justru mengalami susah guna masuk ke bank, jadi fintech semacam ini muncul guna memudahkan individu masuk ke organisasi finansial. Pembiayaan mikro mencoba menghubungkan masalah ini dengan mengalihkan modal usaha secara langsung dari spesialis pinjaman ke peminjam terencana. Kerangka bisnis direncanakan sedemikian rupa sehingga keuntungan serius bagi spesialis pinjaman, namun pada saat yang sama layak bagi peminjam. Salah satu bisnis baru yang menggeluti pembiayaan mikro adalah Amarnya, yang mengasosiasikan para pelaku usaha mini di daerah provinsi dengan penyokong keuangan online.

3. *Digital Payment System*

Fintech jenis ini disibukkan dengan menawarkan jenis bantuan melalui mengurus semua tagihan seperti pulsa dan pascabayar, Visa, atau token listrik PLN. Dengan fintech semacam ini, Anda tidak perlu lagi membeli pulsa di konter ponsel untuk membeli pulsa, atau ke kantor PLN untuk membeli atau membayar token listrik.

4. *E-aggregator*

Alih-alih berbagai jenis fintech di Indonesia, e-aggregator sebenarnya lebih merupakan tahap yang dapat digunakan masyarakat umum untuk melacak data, serta menentukan pilihan tentang item moneter mana yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki pintu masuk otoritas, di mana ada perkembangan data yang diidentikkan dengan item moneter.

5. *P2P Lending*

OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. OJK, "OJK", Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> pada tanggal 6 oktober 2021 pukul 01:00.

⁸ OJK, "FintechLending", diakses dari, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> pada tanggal 5 oktober 2021 pukul 21:30.

Fintech semacam ini tidak diragukan lagi dapat dikenali. Fintech semacam ini memberikan pembiayaan dan mendapatkan administrasi pada tahap yang sama. Pada dasarnya, P2P adalah administrasi subsidi yang menyatukan pendukung keuangan dan individu yang membutuhkan cadangan. Bantuan berbasis pinjaman P2P ini bisa dibilang sangat populer.

Selama dua tahun terakhir, banyak orang yang membicarakan fintech. Khusus tahun ini, kehadiran bisnis fintech dalam menawarkan barang-barang moneter berbasis canggih tampaknya membuka pintu masuk baru bagi individu yang perlu mengajukan kredit. Berbeda dengan administrasi hipotek standar yang disajikan oleh bank atau koperasi, fintech yang berbeda menawarkan pinjaman terdistribusi (P2P Lending) atau uang muka online yang dapat diajukan secara efektif dan tanpa kebutuhan yang membingungkan. Berkat akomodasi dan kecepatannya, fintech menjadi sangat terkenal di kalangan generasi milenial dan diperkirakan akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan laporan individu, seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa pun dapat menjadi klien muka berbasis web untuk menangani berbagai masalah keuangan. Memang, sejak aset diserahkan hingga tiba di klien, fintech hanya membutuhkan waktu hampir 24 jam. Manfaat inilah yang membuat barang-barang moneter begitu langsung menambah ketenaran dan semakin banyak digunakan oleh orang-orang dari berbagai kalangan⁹. Otoritas Administrasi Moneter (OJK) memfokuskan tidak kurang dari 75% populasi dewasa di Indonesia untuk dapat mengakses administrasi lembaga keuangan, dan masyarakat secara bertahap memanfaatkan administrasi fintech untuk mencapai tujuan moneter mereka.

Sesuai dengan POJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/distributed lending/P2P lending merupakan dukungan untuk mendapatkan uang tunai dalam rupiah secara langsung antara penyewa/bank (pemberi pinjaman) dan individu/peminjam yang berutang (penerima manfaat). kredit mengingat inovasi data. Fintech lending disebut juga sebagai Lembaga Pembiayaan dan Perolehan Berbasis Inovasi Data (LPMUBTI). Per 19 Februari 2020, jumlah total tamtama dan pengelola fintech resmi adalah 161 organisasi. OJK mencopot Perjanjian Pendaftaran sebagai Pengurus LPMUBTI untuk 3 organisasi fintech, tepatnya: PT Pinjam Worldwide (Pinjaman), PT Nusantara Advanced Techno (Square Credits) dan PT Unikas Indonesia Pasifik (AdaKita). Fintech P2P lending membuat platform berbasis internet yang memberikan kantor untuk membantu pemilik untuk memberikan pinjaman langsung kepada individu yang berutang dengan hasil yang lebih signifikan, sementara peminjam cadangan dapat mengajukan kredit secara langsung ke pemilik keuangan dengan persyaratan yang lebih sederhana dan siklus yang lebih cepat dibandingkan dengan organisasi keuangan biasa¹⁰.

Cara kerja *P2P lending* adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran pendaftaran. Klien (spesialis pinjaman dan peminjam) mendaftar secara online melalui PC atau ponsel;
2. Peminjam mengajukan uang muka;
3. Tahap pinjaman P2P rusak dan memilih peminjam yang wajar untuk mengajukan kredit, termasuk menentukan tingkat bahaya peminjam;
4. Peminjam yang terpilih akan ditempatkan pada tahap P2P Lending di Marketplace P2P Lending berbasis internet bersama dengan data yang luas tentang profil dan bahaya peminjam

⁹Kemenkeu, “ *Pinjaman Online*”, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, pada tanggal 6 oktober 2021, pukul 19:30.

¹⁰ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>, diakses pada tanggal 8 november 2021 pukul 20:00

5. Pendukung keuangan pinjaman P2P menyelidiki dan memilih peminjam yang tercatat di pusat komersial pinjaman P2P yang diberikan oleh pangsung.
6. Pendukung keuangan pinjaman P2P memberikan subsidi kepada peminjam terpilih melalui tahap pinjaman P2P.
7. Peminjam mengembalikan uang muka seperti yang ditunjukkan oleh jadwal penggantian uang muka ke tahap pinjaman P2P.
8. Pendukung keuangan pinjaman P2P mendapatkan aset penggantian kredit dari peminjam melalui tahap¹¹.

Bagi peminjam, keuntungan dari pinjaman P2P adalah bahwa proses aplikasi di muka lebih cepat dan lebih mudah dan tidak ada persyaratan untuk keamanan. Namun perlu juga diingat sobat, bahwa masuk ke P2P lending juga memiliki peluang, tepatnya biaya pembiayaan kredit yang memadai dan denda yang harus dipungut saat telat membayar. Untuk sementara, bagi bank/rentenir, kerangka pinjaman P2P ini akan mempermudah peningkatan pembiayaan, sehingga memperluas peluang untuk memperoleh keuntungan. Namun, jika rentenir telah membagikan uang tunai melalui pinjaman P2P, bank tidak dapat menarik uang tunai yang tersedia kapan pun Anda butuhkan dan ada kemungkinan peminjam akan gagal bayar, sehingga aset yang dipinjamkan berada dalam bahaya gagal bayar. Oleh karena itu, sangat penting untuk meminta aset dari satu peminjam, tetapi untuk beberapa waktu peminjam untuk membatasi bahaya, selain itu, rentenir juga bekerja dengan adanya data tingkat bahaya (tingkat bahaya) yang ditentukan oleh tahap pinjaman P2P sehingga bank dapat berpikir dengan hati-hati. lama sebelum memberikan kredit.

The Monetary Administrations Authority (OJK) has delivered the most recent rundown for authorized and enlisted fintech loaning. Presently the quantity of fintech loaning players has reached 106 as of October 6, 2021. From this rundown, there are 13 fintechs whose status has changed from enrolled to authorized and one has returned its enlistment mark. Then, there are PT Computerized Miniature Indonesia (DanaBijak), PT Danafix Online Indonesia (Danafix), PT Strong Fintek Indonesia (AdaModal). Followed by PT Sejahtera Sama Kita (SamaKita), PT Klikcair Magga Jaya (KlikCair), PT Sahabat Mikro Fintek (Samir), and PT In addition to Ultra Abadi (Uatas). 98 coordinators," said OJK cited by Kontan.co.id, Monday (11/10). In the mean time, the OJK likewise expressed that there was a decrease in one fintech loaning player who returned his enlistment testament because of the administrator's failure to proceed with functional exercises. The fintech player who returned his enlistment endorsement was PT Alfa Fintech Indonesia or known as Kreditcepat. With this declaration, OJK inclinations people in general to utilize the administrations of fintech loaning suppliers that have been enrolled/authorized from the OJK. Coming up next is an itemized rundown of authorized and enrolled fintechs with the OJK as of October 6, 2021: Rundown of authorized fintechs: ShopeePayLater Danamas Investree Amartha Kilat Wallet Kimo Capital Shop Cash Modalku Companions KTA Speedy Credit Shrewd Maucash Finmas KlikACC Speed increase Ammana.id LoansGo KoinP2P Treedana Mekar Adakami Esta Kapital Fintek Kreditpro Fintek Quick Rupiah Crowdo Indodana Julo Acquire Winwin FundsRupiah Taralite Getting Capital Sanders One Stop Arrangement Experience a Haze of Money Finances Now Lion Duha SYARIAH Merdeka Asset Easycash Getting Come FinPlus Cash Getting Cash Syariah Subsidizes Batuumbu CREDITO Public Quick Money KlikUMKM Concerning Getting Simple

¹¹ *Ibid.*.

Portions Lumbungdana 360 CREDIT Dhanapala Pinter Modular Rakynesia Credit. ID DanaBagus SOLUSIKU Cairin Invoila TrustIQ Snap US MEASURE Public Modular Lightweight TaniFund AVANTEE GRADANA Danacita Ikimodal Indofund.id iGrow Danai.id JEMBATANEMAS ACTIVAKU Dumi IVOJI DoeKu danIN Qazwa LAHANSIKAM KrediFazz Indosaku Edufund Accomplices with PAPITUPI Syariah nafix UATAS KlikCair AdaModal Samakita Samir.¹²

3.1.2 Kasus-Kasus Tentang Pinjaman Online

Dunia dilanda Pandemi Corona virus Sembilan belas (*COVID-19*) dan Negara Indonesia salah satu penderita dampak besar adanya virus tersebut. Dampak virus tersebut menyebar keseluruh faktor-faktor nilai penting dalam kehidupan, Kesehatan, pendidikan hingga ekonomi. Indonesia terus melakukan peningkatan dalam memperkuat berbagai proyek asuransi sosialnya untuk mengatasi keadaan darurat setelah pandemi Coronavirus. Program asuransi sosial ini telah diperluas untuk melindungi jaringan dari guncangan keuangan, seperti halnya individu yang rendah namun berkembang namun menjadi lebih tidak berdaya terhadap bahaya jatuh ke dalam kemiskinan suatu saat nanti. Selain itu, perusahaan swasta juga mendapatkan bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk tetap bertahan di tengah penurunan aktivitas bisnis dan lokal setelah pandemi Coronavirus¹³. Pengangguran yang semakin lama semakin bertambah dari sempitnya lapangan pekerjaan serta pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran membuat masyarakat “memutar otak” untuk bertahan hidup. Praktik kondisi keuangan yang menyusahakan karena pandemi virus corona dan lebih jauh lagi perilaku masyarakat yang terkomputerisasi, kata penonton sosial. Seorang klien uang muka yang melanggar hukum menceritakan pengalamannya ketika membuat uang muka, dari biaya pinjaman yang terlalu tinggi hingga teknik-teknik pemilihan yang merusak. Hingga saat ini, polisi telah mengungkap 15 kasus kredit berbasis web yang melanggar hukum, dengan 45 tersangka di beberapa daerah akhir-akhir ini. Dalam pergantian peristiwa terbaru, polisi telah menetapkan tiga tersangka untuk pinjaman gelap dan pengawasan uang muka oleh Dana Investasi Solusi Andalan Bersama dan Credit Agreeable - tersangka penindas berbasis rasa takut yang membuat seorang ibu mengakhiri semuanya karena melunasi debitur. Layanan Korespondensi dan Inovasi Data sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pulsa berbasis internet. Bareskrim Polri telah menangkap tiga tersangka dalam kasus uang muka dan uang muka yang melanggar hukum dari Dana Cadangan dan Kredit Berbantuan Solusi Andalan Bersama (KSP) dan menyita sekitar Rp. 21 miliar. Polisi menyebut KSP Solusi Andalan Bersama yang memiliki 34 aplikasi haram tersebut merupakan spekulasi penindas psikologis, seorang ibu di Wonogiri, Focal Java, yang memilih untuk mengakhiri semuanya karena terjebak dalam jerat. "Di Wonogiri, ketika korban mengakhiri semuanya karena bahaya yang tak terhitung jumlahnya ... ternyata dia memiliki uang muka untuk 23 aplikasi ilegal, yang aplikasinya diawasi oleh KSP Solusi Andalan Bersama," kata Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono di sesi tanya jawab. Pengawas Tindak Pidana Moneter dan Luar Biasa Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Helmy Santika saat itu juga mengatakan, ketiga tersangka itu adalah JS, DN, dan SR. "Ada 95 KSP lain yang dibuat dengan asumsi JS dan ini sebagian besar adalah hasil rekayasa... Spekulasi ini menawarkan KSP kepada financial backer. Saat ini kami sedang mencari financial backer di dalam maupun luar negeri," ujarnya. Helmy mengatakan, kasus ini merupakan satu dari 15 kasus

¹² <https://newssetup.kontan.co.id/news/simak-daftar-lengkap-fintech-p2p-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-dari-ojk>, diakses pada tanggal 8 november 2021 pukul 20:00

¹³ Semeru, “*dampak Covid-19*”, diakses dari <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, pada tanggal 7 oktober 2021 pukul 00:30

peminjaman uang secara tidak sah yang saat ini ditangani oleh Polri dengan 50 pelaku yang diduga sebagai pengurus, pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman.¹⁴

Yayasan kredit online dapat menjadi pengaturan keuangan, banyak dari mereka merasa putus asa saat menggunakannya. Mulai dari dibebani bunga yang terlalu tinggi, hingga perlakuan buruk dari pihak berwenang. Tidak sedikit klien kredit online yang mengeluhkan keberatan serupa. Sebagian dari kasus tersebut antara lain:

1. Kasus Vloan Menjelang awal tahun ini, tepatnya pada bulan Januari, Polisi menetapkan empat perwakilan organisasi fintech peer 2 friend (P2P) lending ilegal, Vloan, sebagai tersangka. Mereka terlibat dengan contoh-contoh hiburan erotis, bahaya, korupsi, bahaya kebiadaban, dan teror melalui media elektronik dalam mengumpulkan kredit dari klien mereka. Vloan adalah fintech pinjaman P2P yang dimiliki oleh PT Vcard Innovation Indonesia. Kasus Vloan ini merupakan kasus pungutan liar aplikasi fintech pertama di Indonesia yang ditangani Polri.
2. Cabbie mengakhiri semuanya pada Februari 2019, seorang sopir taksi dilacak mati menyeimbangkan dirinya di sebuah motel karena ia terjebak dalam kredit berbasis internet. Sebab, dalam suratnya, pria yang lahir di Padang tahun 1984 itu mengabarkan bahwa dirinya berutang dan dikejar rentenir online. "...Wahai pemberi pinjaman predator online, kita akan bertemu nanti di alam liar...", tulis korban bernama Zulfadhli dalam suratnya. Zulfadhli juga mengimbau keluarganya untuk tidak membayar kewajiban kepada rentenir online. "Kepada OJK dan para pakar, kalau tidak terlalu repot, musnahkan rayuan online yang bikin jerat menghebohkan itu," ujarnya.
3. Upaya penghancuran diri seorang ibu rumah tangga Seorang wanita berinisial, tidak tega meminum bahan bakar lampu untuk mencoba mengambil nyawanya. Jauh lebih memilukan, upaya penghancuran diri yang mendasari selesai karena masalah kewajiban sebesar Rp. 500 ribu dari aplikasi fintech. Pria berusia 40 tahun ini berperan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan peran penting lainnya adalah sebagai sopir taksi penjelajah berbasis internet. Mereka memiliki tiga anak, dua di antaranya benar-benar membutuhkan uang untuk pergi ke kelas. Ia juga masih harus menanggung keberadaan ibunya yang lebih tua dan terlantar di rumah. Perempuan tamatan sekolah profesi ini sejak awal mengakui bahwa iuran yang harus dikeluarkannya sangat besar, yakni sekitar 20%. Uang tunai yang diperolehnya tidak dapat dibagikan secara umum karena ada biaya manajerial yang sangat besar. Pada awalnya, L merasa sangat akomodatif dengan aplikasi tersebut. Namun dalam jangka panjang dia merasa dananya semakin menipis karena dia membuka sembilan aplikasi di muka untuk menutupi kewajiban dari berbagai aplikasi.

Komando Pusat Polri mencatat tidak kurang dari 14 kasus kredit berbasis internet yang terungkap selama 2018-2021. Pelakunya menggunakan mode yang berbeda untuk memperdaya tujuan mereka. "Tekniknya adalah menawarkan proposal kepada klien yang direncanakan dengan

¹⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, diakses pada tanggal 6 november 2021 pukul 15:00

kebutuhan sederhana tanpa bertemu atau bertemu secara dekat dan pribadi. Ini memiliki syarat bagi klien untuk mengikuti strategi dan ketentuan dalam aplikasi lanjutan berbasis web..

Selain itu, ada penundaan cicilan, pihak bank bisa mengumpulkan nama-nama yang tertera di kontak ponsel nasabah. "Kontak dan kantor aplikasi untuk pemasok uang muka aplikasi berbasis web tidak jelas, peminjam telah membayar kredit, tetapi uang muka tidak dihapus karena dikeluarkan dari kerangka kerja," katanya. Informasi KTP dimanfaatkan oleh pemasok aplikasi kredit online untuk mengajukan uang muka di berbagai aplikasi. Bos Polisi Publik mengharapkan partisipasi pertemuan terkait untuk membunuh kredit berbasis web yang melanggar hukum. "Partisipasi untuk melindungi orang-orang secara umum dari kredit berbasis web yang melanggar hukum dan memperkuat upaya untuk menghancurkan kemajuan berbasis web yang tidak sah, dan energi kooperatif untuk melindungi masyarakat umum dari menawarkan promosi berbasis web yang melanggar hukum dan upaya untuk membunuh kemajuan berbasis web yang tidak sah, "

Selama empat belas hari terakhir, Polri telah berhasil mengungkap 13 kasus yang diidentifikasi dengan organisasi kredit gelap berbasis internet di beberapa kabupaten di Indonesia. Dari 13 kasus tersebut, 57 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Atasan Divisi Periklanan Divisi Periklanan Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan, Polri tidak akan berhenti dan terus mengusut kasus-kasus pungutan liar.

3.1.3 Dasar Hukum Pinjaman Online

Administrasi peminjaman dan akuisisi berbasis inovasi data dikaji di Peraturan Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016/2016 perihal Administrasi Perolehan Pinjaman Berbasis Inovasi Data ("POJK 77/2016"). Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menjelaskan jika: administrasi peminjaman dan perolehan berbasis inovasi data adalah pengaturan administrasi moneter untuk menyatukan penjamin dan penerima kredit untuk melakukan pengaturan peminjaman dan penerimaan uang rupiah secara langsung melalui kerangka elektronik dengan memanfaatkan organisasi web. . Penyedia administrasi peminjaman dan penerimaan berbasis inovasi data ("koordinator") adalah agen sah Indonesia yang memberi, membuat, dan mengerjakan administrasi peminjaman dan perolehan data berbasis inovasi. Selain itu, bank merupakan suatu individu, unsur yang sah, dan juga badan usaha yang memiliki piutang karena suatu sistem peminjaman dan administrasi berbasis inovasi data. Sementara itu, penerima uang muka adalah individu perindividu juga unsur hukum tambahan yang memiliki kewajiban sebab suatu pengaturan administrasi kredit berbasis inovasi data. Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menjelaskan jika:

"Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan

perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman."

Lain itu, penyelenggara harus mendaftarkan juga memperoleh izin pada Otoritas Administrasi Moneter ("OJK"). Atas pelanggaran terhadap komitmen tersebut, Pasal 47 ayat (1) POJK 77/2016 yang berbunyi: Sehubungan dengan komitmen juga larangan saat pedoman OJK ini, OJK akan memberlakukan persetujuan manajerial kepada Penyelenggara sebagai:

1. peringatan yang tersusun

2. denda, khususnya komitmen guna membayar senilai uang tunai tersebut
3. latihan bisnis dan
4. penolakan izin.

Persetujuan manajerial sebagai denda, pelaksanaan bisnis, dan pencabutan izin, dipaksakan dengan atau tanpa terlebih dahulu dengan beban persetujuan sebagai pemberitahuan tertulis. Persetujuan otoritatif sebagai denda dapat dipaksakan secara independen atau bersama dengan ketidaknyamanan persetujuan manajerial lainnya.

Sesuai Pasal 3 ayat (2), tanggung jawab penawaran koordinator oleh penduduk yang tidak dikenal atau zat yang sah, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah 85%. "Poin paling ekstrim pemberian hadiah kredit ditetapkan Rp 2 miliar," membaca Pasal 6 ayat (2) yang mengatur pemberian hadiah. POJK juga merupakan komitmen bagi fintech yang telah terdaftar di OJK guna melakukan laporan berkala dengan runtut. Pinjaman terdistribusi Fintech juga diperlukan untuk memiliki SDM berkualitas yang memiliki kemampuan dan landasan di bidang inovasi data. "Koordinator harus mempunyai sekitar satu koleksi dan satu hakim yang telah satu tahun berkecimpung dalam industri administrasi moneter," membaca Pasal 14 ayat (2). Pasal 24 menyatakan bahwa koordinator diperlukan untuk memanfaatkan rekening escrow dan catatan virtual. Catatan virtual untuk setiap spesialis pinjaman. Penggantian kredit oleh penerima kredit dilakukan melalui angsuran ke catatan escrow koordinator untuk memberikan kredit ke catatan virtual bos pinjaman. Sementara itu, untuk jaminan pemberi dan penerima kredit, administrator yang bergantung pada Pasal 29 diperlukan untuk menerapkan standar keterusterangan, perlakuan yang wajar, privasi, dan keamanan informasi, dan penyelesaian klien secara mendasar dan sederhana.¹⁵

3.1.4 Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait Pinjaman Online

Banyak orang merasa bahwa uang muka berbasis internet ini ialah jawaban yang gampang juga efisien guna memperoleh uang. Tapi, dibalik kesesuaian tersebut, ternyata terdapat akibat dan bahaya yang akan disadari oleh klien jika mereka menyalahgunakan komitmennya. Peningkatan bisnis fintech juga terkait dengan aib negatif daerah, terutama dalam cara pengisiannya. Isu Kredit Online atau Pinjaman Bersama Inovasi Moneter (Fintech P2P) semakin menjadi sorotan publik. Berbagai contoh pelanggaran Organisasi Fintech mulai muncul dalam komunikasi yang luas. Ada berbagai jenis pelanggaran oleh organisasi Fintech. Mulai dari tuntutan mengancam (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 terkait UU ITE), penyebaran informasi individu (Pasal 32 terkait Pasal 48 UU ITE), penyesatan (Pasal 378 KUHP) sampai cabul. perilaku lewat media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 UU ITE) yang konon ada pada hal ini. Pelanggaran yang ditegaskan berbeda, satu diantaranya berasal lewat dampak laporan protes konsumen yang diperoleh melalui Lembaga Pembina Hukum (LBH) yang berbeda terhitung setahun lalu. Akhirnya, isu fintech ini melalui membunuh klien yang memutuskan untuk mengakhiri semuanya karena sedih dengan beragamnya kemajuan tersebut. Sayangnya, jawaban yang sah untuk masalah ini masih belum signifikan, sehingga kasus perbandingan terus tumbuh.

Sesuai dinyatakan pada Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara diperlukan untuk memberikan permohonan juga pengesahan ke OJK. Mengingat penyelidikan hukum umum tentang

¹⁵ *Ibid.*

inovasi moneter bahwa kegiatan yang sah yang muncul di antara individu berutang dan bos pinjaman bergantung pada pemahaman. Dalam administrasi aplikasi Kredit berbasis Web, banyak orang mengeluh tentang masalah penyebaran informasi individu oleh pemasok Uang Muka berbasis Web tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik. Hasil tinjauan menunjukkan jika jaminan dan otorisasi yang sah untuk pelanggaran informasi individu telah diarahkan pada Pasal 32 terkait dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Data dan Pertukaran Elektronik, namun secara eksplisit tentang jaminan dan persetujuan yang sah untuk pelanggaran informasi individu. dalam penyelenggaraan Kredit Berbasis Internet telah tercatat dalam Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Perkreditan Berbasis Inovasi Data, sesuai pebegasan di Pasal 26 jika koordinator bertanggung jawab untuk memproteksi privasi, kehormatan dan aksesibilitas informasi klien sendiri dan dalam pemanfaatannya harus mendapat dukungan dari individu pemilik informasi kecuali jika dalam hal apapun ditentukan oleh pengaturan undang-undang. Sanksi untuk pelanggaran informasi individu mengacu pada Pasal 47 ayat (1), khususnya otorisasi manajerial sebagai peringatan, denda, komitmen untuk membayar sejumlah uang tunai, pembatasan latihan bisnis dan penolakan lisensi.¹⁶

Standar wilayah hukum yang sah pasti ditegaskan dalam menangani masalah hukum ini. Kemudian lagi, jaminan hukum untuk klien muka online adalah sudut pandang yang benar untuk ditangani oleh para ahli. Asuransi Nasabah Penatausahaan Sesuai Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib mengimplementasikan standar awal jaminan Nasabah, khususnya, keterusterangan, perlakuan yang wajar, kualitas yang tidak tergoyahkan, klasifikasi dan keamanan informasi, sebagaimana tujuan pertanyaan Nasabah dalam suatu biaya dasar, cepat dan masuk akal.

⁷ Penyelenggara maupun Organisasi Fintech bisa diberikan hukuman jika melanggar aturan Pasal 43 juga Pasal 47 POJK 77/2016 yang tertulis berikut ini:

Pasal 43:

- a. sebuah. menyelesaikan aktivitas usaha berlainan aktivitas usaha Pemasok sebagaimana dikaji pada Pedoman OJK ini;
- b. pergi menjadi spesialis Pinjaman maupun Peminjam;
- c. memberikan jaminan secara keseluruhan strukturnya untuk kepuasan komitmen pertemuan yang berbeda;
- d. menerbitkan perlindungan kewajiban;
- e. memberikan saran kepada Klien;
- f. mendistribusikan data yang ditemukan serta menipu;
- g. menawarkan administrasi kepada Klien serta masyarakat umum melalui kantor korespondensi yang dekat dengan rumah tanpa persetujuan Klien; dan
- h. membebankan biaya apa pun kepada Klien untuk mendokumentasikan protes.

⁷ Pasal 47: Untuk pelanggaran

¹⁶ *Ibid.*

komitmen dan larangan pada pedoman OJK ini, OJK berwenang untuk memaksakan persetujuan yang sah kepada Penyelenggara sebagai:

- a. sebuah peringatan yang tersusun;
- b. denda, khususnya komitmen guna membayar senilai uang tunai tertentu;
- c. kendala latihan bisnis; dan
- d. penolakan izin.

Dengan demikian, masalah ini memiliki tempat dengan kelas pengaturan piutang kewajiban sehingga bukan masalah pidana tetapi merupakan masalah umum. Akibatnya, keamanan hukum untuk klien Kredit Online masih banyak pembeli yang lemah, karena sanksi terhadap koordinator atau organisasi Fintech masih terbatas pada persetujuan regulator. Untuk klien yang ingin mengajukan pertanyaan, mereka dapat diajukan ke perusahaan yang diidentifikasi sebagai pembeli yang malang, seperti Yayasan Pembeli Indonesia (YLKI), atau Lembaga Pembina yang Sah (LBH).¹⁷

3.1.5 Perlindungan Hukum Debitur terhadap Pelanggaran-pelanggaran dalam Pinjaman Online

1. Legalitas suatu Pinjaman Online berbasis Aplikasi

OJK saat ini mengelola Fintech Loaning Suppliers lewat 3 (tiga) teknik, yakni: a. Offsite, lewat laporan yang diberikan ke OJK (FAQ Nomor 38) dan selanjutnya harus memiliki rencana eksekusi dengan server Organisasi dengan menggunakan Desain Komponen berbasis Informasi sesuai dimaksud pada Struktur 3C POJK 77/2016. B. Market Lead (Semi SRO), sebagaimana diatur dalam Pasal 48, semua Pemasok harus tercantum jadi perseorangan dari afiliasi yang diperintah oleh OJK. OJK sudah memilih Afiliasi Fintech Subsidi Indonesia (AFPI) pada 17 Januari 2019. AFPI mempunyai seperangkat prinsip juga mencairkan beragam tindakan yang diarahkan oleh OJK, termasuk titik pemutusan bunga yang paling ekstrim dan sistem bermacam-macam. OJK secara konsisten bertemu dengan AFPI satu kali dalam seminggu. C. Di lokasi, melalui komponen penilaian langsung, baik secara berkala maupun sesekali.

- a. Perbedaan antara Fintech Loaning Administrator yang terdaftar dan yang berwenang

Keduanya dapat melakukan latihan fungsional sesuai pedoman yang relevan. Administrator Terdaftar dapat melakukan latihan fungsional sampai 1 (satu) periode sesudah mendapatkan otentikasi tercantum juga kemudian diperlukan untuk mengajukan izin. Untuk sementara, Administrator yang berwenang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa pada cetakan resminya.¹⁸

- b. legalitas Pinjaman Online

Syarat guna jadi Penyelenggara utamanya teradapat di POJK 77/2016, juga guna mempermudah korporasi guna merencanakan dokumen pemberkasan syarat administrasi, produsen sudah memberikan daftar berkas yang mesti disediakan saat memberikan proposal pendaftaran juga perizinan untuk penyelenggara LPMUBTI juga bisa digunakan di web resmi OJK.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses pada tanggal 9 november 2021 pada pukul 11:00

2. Tata Cara Pendaftaran Pinjaman Online di OJK

(I) Koordinator yang akan datang wajib mempunyai wawasan perihal ⁶POJK. Unduh dan pahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Kaitannya.

(ii) Koordinator yang akan datang mengisi catatan pendaftaran. Unduh agenda pendaftaran dan lengkapi semua dokumen sesuai segmen data. (iii) Koordinator yang direncanakan mengirimkan catatan pendaftaran. Dokumen yang sudah jadi dikirim dari Kantor Otoritas Administrasi Moneter Wisma Mulia 2 Lt. 17 (mailing room). (iv) Proses konfirmasi rekaman* Puncak dan kewajaran dokumen akan dikaji oleh Direktorat Pembinaan, Kuasa dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK.

(v) Pelaksanaan Bantuan* Percakapan kekurangan maupun penyempurnaan dokumen yang sudah dikirim. Pengurus yang akan datang diberikan jangka 10 (sepuluh) hari kerja guna menyelesaikan dan mempresentasikan kulminasi dan modifikasi catatan tersebut kepada OJK.

(vi) Demo Langsung dan Penilaian Kesesuaian* Koordinator yang akan datang ⁶akan memperkenalkan rencana aksi dan meniru kerangka elektronik, seperti memimpin evaluasi dan uji kesamaan oleh OJK pada Pemilik, Direktorat dan Pimpinan Badan.

(vii) Site Visit OJK akan mengunjungi tempat kerja calon Administrator dan benar-benar melihat status fungsional organisasi. (viii) Terdaftar Status Administrator yang sudah mencukupi tahap-tahapan juga bisa melampaui tiap proses di atas bisa memperoleh tanda tercantum di OJK.¹⁹

3. Hak-Hak Pengguna Jasa Pinjaman Online sebagai Debitur

Keistimewaan klien administrasi adalah sudut pandang yang perlu dipertimbangkan dari koperasi spesialis kredit online. Untuk situasi ini, kesepakatan yang diberikan adalah penghargaan bagi seseorang untuk menggunakan layanan kredit online. Oleh karena itu, koperasi spesialis kredit online juga harus dapat berfokus pada hak-hak klien bantuan uang muka online sebagai pembeli. Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Inovasi Data tidak menggambarkan secara menyeluruh kebebasan klien administrasi muka online. Meskipun demikian, dalam pasal-pasal yang mengatur komitmen dan larangan pemasok uang muka online, sangat mungkin terlihat bahwa hak-hak klien dari administrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hak atas data terbaru sehubungan dengan Administrasi Pinjaman dan Perolehan Berbasis Inovasi Data (Pasal 30 Ayat (1))

2. Hak atas data penerimaan, penundaan, atau penghentian penggunaan untuk Administrasi Peminjaman Berbasis Inovasi Data dan tujuan di balik itu (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))

3. Pilihan untuk mendapatkan data dari catatan listrik menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sulit untuk dibaca dan dipahami oleh klien. Bahasa Indonesia dalam laporan juga dapat dicocokkan dengan dialek yang berbeda jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))

4. Hak atas keamanan dari segala upaya untuk mengalihkan kewajiban atau komitmen Administrator kepada Klien. (Pasal 36 Ayat (1))

¹⁹<https://www.ojk.go.id/id/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQTerkaitLayananPinjamMeminjamUangBerbasisTeknologiInformasiKategoriPerusahaanPenyelenggara/FAQ%20LPMUBTI%20-%20KATEGORI%20PERUSAHAAN%20PENYELENGGARA.pdf>, diakses pada tanggal 10 november 2021 pukul 11:30

5. Hak atas jaminan dari komitmen klien untuk menyesuaikan dengan yang baru, ekstra, berproses serta perubahan yang dibuat secara khusus oleh Administrator selama klien menggunakan bantuan. (Pasal 36 Ayat (2))

6. Pilihan untuk mendapatkan remunerasi untuk kemalangan klien yang muncul dari kesalahan dan juga kecerobohan staf manajerial puncak serta perwakilan koordinator.

7. Pilihan untuk mengamankan pengaturan informasi dan data tambahan tentang klien kepada pihak luar tanpa persetujuan klien (Pasal 39).²⁰

Hak-hak istimewa ini adalah kebebasan yang harus dimiliki oleh klien dari administrasi muka online. Demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli Pasal 4 yang mengatur tentang keistimewaan pembeli sebagai berikut:

- a. Hak untuk pelipir lara, keamanan, dan kesejahteraan dalam melahap barang dagangan atau berpotensi menguntungkan;
- b. Hak untuk memilih barang dagangan dan keuntungan tambahan dan untuk mendapatkan produk tersebut atau keuntungan potensial sesuai dengan standar konversi dan kondisi dan jaminan yang dijamin;
- c. Hak untuk mendapatkan data yang benar, jelas dan sah sehubungan dengan kondisi dan jaminan barang dagangan dan manfaat tambahan;
- d. Hak untuk mendengar perspektif dan protes mereka tentang produk dan administrasi yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan promosi, jaminan, dan upaya yang tepat untuk menentukan pertanyaan keamanan pembeli;
- f. Hak untuk mendapatkan arahan dan pelatihan pembelian;
- g. Hak untuk ditangani atau dilayani secara akurat dan benar dan tidak menindas;
- h. Hak untuk mendapatkan imbalan, pembayaran, serta penggantian, jika barang dagangan dan tambahan manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan pengaturan atau tidak sesuai; I. Kebebasan yang dikendalikan dalam pengaturan hukum dan pedoman yang berbeda.²¹

3.1 Penyelesaian Sengketa Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi

Mengingat data yang Anda berikan, kami menerima ungkapan "melanggar hukum" yang Anda maksudkan kepada penyelenggara yang tidak memenuhi komitmennya untuk mendaftar dan mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK 77/2016. Hendaknya diperhatikan bahwa pengaturan itu hanya berlaku bagi perkumpulan-perkumpulan yang membuatnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Umum: Semua pengaturan yang dibuat menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi orang-orang yang membuatnya. Pengaturan tidak dapat dihapus dengan cara lain selain pemahaman dari dua pemain, atau untuk alasan yang dikendalikan oleh hukum. Pengesahan harus dilakukan dengan niat terbaik. Sebagaimana dijelaskan dalam POJK 77/2016, pemasok dan pemasok dan penerima uang muka adalah tiga substansi yang berbeda. Koordinator dibatasi untuk pemasokanggung yang menyatukan rentenir dan penerima manfaat sebelumnya. Sementara itu, seperti yang akan kita lihat, mengacu pada Pasal 18 huruf b POJK 77/2016, kesepakatan awal yang Anda buat pada

²⁰ Yuliana Primawardani, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)", Jurnal. Halaman 359

²¹ *Ibid.*

dasarnya adalah antara spesialis pinjaman dan peminjam, bukan pemasok. Praktis, selama pemeriksaan kami, pemasok kemudian, pada saat itu, bertindak sebagai perantara rentenir dalam memberikan uang muka kepada peminjam. Pemberian wewenang hukum secara umum itu diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menjelaskan bahwa:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

Mengingat pengaturan ini, pemberian otoritas hukum penuh memungkinkan administrator untuk membuat kesepakatan dengan penerima uang muka untuk kepentingan pemberi pinjaman uang. Sejalan dengan itu, penerima kuasa hukum penuh juga harus memenuhi komponen emosional dalam Pasal 1320 Common Code.

Dalam artikel tentang keabsahan pengaturan yang dibuat oleh kepengurusan CV sebelumnya, Ketut Oka Setiawan dalam buku Hukum Komitmen, sebagaimana dikutip oleh Rusti Margareth Sibuea, ia mengakui kekurangan menjadi:

Ketidakterampilan untuk bertindak (menangani onbekwaamheid), khususnya individu yang sama sekali tidak layak untuk melakukan aktivitas yang halal. Orang-orang ini dirujuk dalam Pasal 1330 Common Code. Kegagalan untuk bertindak (menangani onbevoegheid), khususnya individu yang tidak dapat membuat aktivitas tertentu yang sah secara sah. Efek samping dari kekurangan ini adalah tidak terpenuhinya komponen abstrak dalam pengaturan. Dengan demikian, seperti yang ingin kami pikirkan, perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan penerima uang muka ketika pemasok uang muka dan menerima uang tunai secara elektronik dalam status tidak berlisensi dapat dibatalkan. Untuk situasi ini, koordinator tidak memenuhi komponen keahlian karena tidak terdaftar dan disahkan oleh koordinator.²²

Akibat Perjanjian Pinjam Meminjam Dibatalkan antara lain :

Seandainya pengaturan itu dibatalkan, maka perkumpulan-perkumpulan itu bergantung pada pengaturan Pasal 1451 Kitab Undang-undang Hukum Umum, yang berbunyi: Penegasan penghapusan ikatan yang tergantung pada ketidakmampuan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330, menghasilkan pemulihan. barang dagangan dan orang-orang khawatir dalam kondisi yang sama seperti sebelum komitmen dibuat. , dengan persetujuan bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang yang tidak berhak, karena perikatan, harus diperoleh kembali dengan asumsi barang dagangan yang bersangkutan masih menjadi milik orang yang tidak berhak, atau sekali lagi jika hal itu terjadi, orang ini telah diuntungkan dan apa yang telah diberikan atau dibayar atau kemudian lagi jika apa yang dihargai telah digunakan untuk kecenderungannya. Seperti yang akan kita lihat, karena segala sesuatunya kembali ke keadaan semula sebelum kesepakatan kredit dibuat, Anda pada dasarnya berkewajiban untuk mengembalikan semua uang yang telah diperoleh. Sehubungan dengan apakah uang muka Anda tercatat atau tidak dalam Kerangka Administrasi Data Moneter OJK ("SLIK"), seperti yang ingin kami pikirkan, tidak memutuskan keabsahan kesepakatan awal yang telah Anda setuju. Sejak awal, lembaga peminjaman dan perolehan berbasis elektronik tidak perlu melaporkan SLIK. Pasal 3 Ayat (1)

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d82e273126a2/hukumnya-jika-terlilit-utang-pinjol-ilegal/>, diakses pada tanggal 9 november 2021 pada pukul 12:00

Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 18/POJK.03/Jangka Panjang Tahun 2017 tentang Pengungkapan dan Penyebutan Data Pemegang Utang Melalui Kerangka Administrasi Data Moneter hanya menetapkan bahwa: Badan Administrasi Moneter Lainnya yang memberikan inovasi data berdasarkan administrasi peminjaman dan perolehan dan Lembaga Keuangan Mikro dapat menjadi Detailing Gathering dengan mengajukan permohonan dan mendapatkan pengesahan OJK dengan memenuhi prasyarat sebagai berikut:

1. memiliki landasan yang cukup;
2. memiliki informasi yang diperlukan dalam SLIK; dan
3. menyetujui kesepakatan untuk berminat mengungkapkan dan menyebutkan Data Pemegang Utang melalui SLIK.²³

Berkaitan dengan pelanggaran dapat mengajukan pertanyaan kepada OJK berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Administrasi Moneter, yang membaca: OJK menawarkan jenis bantuan untuk pengaduan pembelanja yang meliputi:

1. merencanakan perangkat keras yang memuaskan untuk membantu protes pembeli yang telah disakiti oleh para penghibur di Yayasan Administrasi Moneter;
2. membuat instrumen keberatan bagi pembeli yang dirugikan oleh penghibur di Badan Administrasi Moneter; dan
3. bekerja dengan pembayaran kembali keluhan pembelanja yang telah dirugikan oleh pelakunya di Kantor Organisasi terkait Uang sesuai dengan undang-undang dan pedoman dan pedoman di bidang administrasi moneter.

Mengingat keluhan tersebut, OJK bahkan dapat menghalangi dan mengakhiri organisasi bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tidak berizin. Dijelaskan dalam artikel Tidak Semua Gugatan Fintech Melanggar Hukum Dapat Ditindaklanjuti oleh Tim, latihan 231 koperasi spesialis pinjam uang tunai berbasis inovasi data dihentikan karena tidak terdaftar dan mendapat persetujuan OJK. Masyarakat umum juga dapat berdiskusi dengan OJK sebelum memanfaatkan layanan fintech shared lending melalui kontak OJK 157 atau consumer@ojk.go.id.

3.2.1 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi

Pada dasarnya pengaturan tentang hukuman dalam pelanggaran-pelanggaran tentang diatur dalam bab Sanksi Pasal 47 yang berbunyi:

"(1) Atas pelanggaran terhadap komitmen dan larangan dalam pedoman OJK ini, OJK berwenang memberikan kewenangan pengaturan kepada Penyelenggara berupa: a. teguran tertulis; b. denda, khususnya komitmen untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha, dan D. penolakan izin (2) Pengesahan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dipaksakan dengan atau tanpa didahului dengan beban persetujuan pengaturan sebagai pemberitahuan tertulis sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Persetujuan kewenangan berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipaksakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan beban persetujuan regulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d"

Namun dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan sanksi-sanki yang diberikan kepada pelanggar ketentuan pinjaman online dalam bentuk resmi, lalu bagaimana terhadap pelanggaran-

²³ *Ibid.*

pelanggaran yang diberikan apabila adanya pelanggaran dalam bentuk ilegal dan pelanggaran pidana? Jawabannya Negara Indonesia belum mempunyai regulasi yang jelas tentang hal tersebut.

3.2.1 Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Sesuai dengan penjelasan pembahasan tentang penyelesaian sengketa diatas maka apabila terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaiannya akan kembali ke ketentuan hukum pidana di indonesia. Sebagai contoh pidana-pidana yang dilakukan dalam pinjaman online seperti:

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa halangan.
2. Biaya yang tidak hanya dibebankan kepada peminjam atau kontak krisis yang dimasukkan oleh peminjam.
3. Bahaya, pencemaran nama baik, pemerasan dan perilaku cabul.
4. Penyebaran informasi individu.
5. Penyebaran foto dan data kredit ke kontak di gadget peminjam.
6. Mengambil hampir semua akses ke gadget peminjam.
7. Kontak dan area tempat kerja koordinator aplikasi kredit berbasis web tidak jelas.
8. Biaya administrator kabur.
9. Permohonan berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sementara bunga di muka terus berkembang.
10. Peminjam telah membayar kredit, tetapi uang muka tidak dipotong karena tidak dimasukkan dalam kerangka.
11. Aplikasi tidak dapat dibuka dan bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat pengembalian pulsa diharapkan.
12. Pengisian dilakukan oleh berbagai individu.
13. Informasi KTP digunakan oleh pemasok aplikasi kredit online untuk mengajukan uang muka dalam berbagai aplikasi.
14. Diskon Catatan Virtual tidak berlaku, jadi bunga terus berkembang dan mengancam hasil penagihan.²⁴

Pelanggaran-pelanggaran diatas akan dikenakan pasal-pasal hukum pidana berikut pasal-pasal yang menjeratnya :

1. 1. Penyebaran informasi individu (Pasal 32 terkait Pasal 48 UU ITE)
2. 2. Bahaya bermacam-macam (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE)
3. 3. Pemerasan (Pasal 378 KUHP)
4. 4. Pencemaran Nama Baik (311 Bagian 1 KUHP)
5. 5. Perilaku cabul melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE)²⁵

Akan diselesaikan dalam perkara pidana berikut Tata cara penuntutan pidana :

1. Pendahuluan diucapkan terbuka dan terbuka untuk umum (kecuali jika kasus-kasus tertentu diumumkan tertutup untuk masyarakat umum)
2. PU diminta untuk membebaskan yang dipersalahkan sebelum pendahuluan keadaan bebas;
3. Penggugat dimintakan wataknya dan mengetahui apakah ia telah mendapatkan duplikat dari penuntutan;

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/?page=all>, diakses pada tanggal 9 november 2021 pukul 15:30

²⁵ *Ibid.*

4. Termohon juga diketahui dalam keadaan sehat dan dapat diperiksa sebelum pemeriksaan pendahuluan (dalam hal siap untuk melanjutkan pemeriksaan);
5. Termohon diketahui jika ia akan didampingi oleh seorang konselor yang sah (dengan asumsi ia pergi, terlepas dari apakah akan membawa sendiri, jika ia tidak membawa sendiri, PH akan didelegasikan oleh ruang sidang resmi jika penggugat dikuatkan dengan penahanan lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1);
6. Tetap meneliti penuntutan;
7. Setelah meneliti penuntutan, ternyata Termohon (PH) akan mendokumentasikan pengecualian atau tidak;
8. Pada saat penggugat/PH mendokumentasikan suatu perkara khusus, diberikan kesempatan dan sidang pendahuluan dihentikan;
9. Dengan asumsi ada pengecualian, reaksi Pemeriksa terhadap kasus khusus akan dilanjutkan (replika);
10. Akibatnya, pilihan sela digunakan oleh Majelis Hakim;
11. Jika kasus khusus diberhentikan, dilanjutkan penilaian kasus primer (konfirmasi).
12. Penilaian terhadap saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dengan saksi korban);
13. Diikuti oleh pengamat yang berbeda;
14. Jika ada pengamat moderator, dia juga akan diperiksa, saksi ahli pengamat/master)
15. Penilaian terhadap yang disalahkan;
16. Permintaan (requisitoir);
17. Pengamanan (pledoi);
18. Replika PU;
19. Salin
20. Pilihan oleh Majelis Hakim.²⁶

3.2.2 Langkah Negara Indonesia untuk Menjamin adanya Kepastian Hukum terhadap Pelanggaran Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi

1. Problematika Inti dari Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi

Kenyamanan dan kewajaran yang ditawarkannya, tidak sedikit orang yang memanfaatkan produk muka berbasis internet ini secara impulsif. Sejujurnya, jika dibandingkan dengan hipotek standar, uang muka online memiliki biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan tenor porsi yang lebih terbatas. Pada kemajuan berbasis web, biaya organisasi tidak mudah. Selanjutnya, klien berada dalam bahaya membayar kewajiban yang lebih penting daripada pengaturan yang mendasarinya. Selain itu, klien juga harus membayar biaya keterlambatan dan denda lain yang tidak wajar. Kehadiran kemajuan berbasis internet ini menjadi tanda tanya mengingat masih rendahnya kemampuan moneter masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja berbahaya bagi pemegang utang kredit online untuk terjebak dalam obligasi obligasi yang terlalu berat untuk siap membayar porsinya. Ada banyak informasi yang tersebar di media, yang menceritakan berbagai bahaya yang akan menyelinap jika Anda tidak dapat menjaga bagian muka berbasis internet Anda. Tema mengharukan "Pastikan klien tekfin" muncul yang berisi pengalaman buruk mendapatkan uang di web. Kasus kemajuan berbasis web yang melanggar hukum masih belum terkendali di Indonesia. Beberapa waktu lalu, media berbasis web dihebohkan dengan wawasan tentang seorang pengajar di Semarang Rule, Focal Java, yang terjerat utang kredit haram hingga sejumlah besar rupiah. Memberikan informasi individu di muka berbasis internet memudahkan klien untuk dikejar sehubungan dengan kewajiban mereka. Pengumpul kewajiban menyebarkan bahaya mulai dari pergi ke pengadilan, masuk penjara, hingga layak untuk diberhentikan dari pekerjaan. Tak hanya

²⁶<https://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/tentangpengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 9 november 2021 pukul 15:30

itu, beberapa warganet juga telah menampilkan fintech pulsa berbasis internet yang dapat membaca informasi di ponsel klien. Sejujurnya, banyak yang merekomendasikan bahwa lebih baik tidak membuat kemajuan online. Pasalnya, pengajuan kredit tidak begitu diakui, namun informasi nasabah sudah diperoleh. Selain itu, kredit online juga dianggap sangat tidak menguntungkan bagi pembeli. Misalnya, mengajukan uang muka 1.000.000 rupiah sampai 2.000.000 rupiah, namun bank berbasis web bisa mendapatkan semua informasi klien yang nilainya bisa lebih dari itu, kemudian, ada yang mengatakan, banyak korban mengakhiri itu semua dan fokus pada karena terkait dengan uang muka pinjaman terdistribusi (P2P). Peminjaman). Gara-gara kabar tersebut, beberapa pihak menyarankan agar fintech online credit yang membuat pembeli mengakhiri semuanya harus segera ditutup. Penjelasan, ketegangan pemilahan oleh pengumpul kewajiban memicu stres pembeli. Sementara itu, kenyataan berbeda tentang kredit berbasis web adalah bahwa banyak individu dijangkau oleh fintech sebagai kontak krisis untuk klien mereka. Memang, individu tidak menyadari bahwa dia terhubung. Nantinya, kontak krisis ini akan dikacaukan karena akan selalu dihubungi oleh petugas berbagai kewajiban dari fintech, dan ini tentu sangat mengecewakan.²⁷

Dunia dilanda Pandemi Corona virus Sembilan belas (*COVID-19*) dan Negara Indonesia salah satu penderita dampak besar adanya virus tersebut. Dampak virus tersebut menyebar keseluruhan faktor-faktor nilai penting dalam kehidupan, Kesehatan, pendidikan hingga ekonomi. Indonesia terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai proyek jaminan sosialnya untuk menangani keadaan darurat pascapandemi virus corona. Program-program asuransi sosial ini telah diperluas untuk mengamankan kaum miskin dari guncangan keuangan, seperti halnya pusat-pusat yang lebih rendah membayar daerah-daerah setempat yang jumlahnya terus bertambah namun menjadi tidak berdaya melawan bahaya jatuh ke dalam kemelaratan lebih jauh di ujung jalan. Selain itu, perusahaan independen juga mendapatkan bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk tetap bertahan di tengah keterpurukan finansial dan keterbatasan aktivitas lokal pascapandemi Virus Corona.²⁸ Pengangguran yang semakin lama semakin bertambah dari sempitnya lapangan pekerjaan serta pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran membuat masyarakat “memutar otak” untuk bertahan hidup.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan menjadi permasalahan inti terkait pinjaman online antara lain:

- a. Masyarakat tidak mengetahui perbedaan antara pinjaman online yang resmi OJK ataupun yang tidak sehingga menyebabkan masyarakat asal memilih pinjaman online tanpa mengetahui legalitas terlebih dahulu.
- b. Maraknya kasus pelanggaran tentang pinjaman online tidak terlepas dari kurangnya literasi masyarakat tentang pinjaman online beserta dasar hukumnya

2. Langkah Negara Indonesia Sebagai Regulator Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi

Setelah melakukan serangkaian pembahasan diatas Maraknya kasus pinjaman online dikarenakan kurangnya peraturan perundangan Negara Indonesia yang mengatur Pinjaman Online terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya dalam ranah pidana dapat disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum yang menjadi problematika penegakan penyelesaian hukum pelanggaran-pelanggaran pinjaman online. Tidak adanya kepastian hukum juga masalah yang penting dan harus diselesaikan secepat mungkin terlebih kasus pidana yang marak sekali terjadi

²⁷ Op.Cit hal 5.

²⁸ Semeru, “*dampak Covid-19*”, diakses dari <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, pada tanggal 7 oktober 2021 pukul 00:30

beberapa waktu ini. Negara Indonesia harus segera membuat peraturan yang jelas mengatur tentang pemidanaan pelanggaran pinjaman online dan peraturan tentang legalitas suatu pinjaman online bukan hanya terkait dengan terdaftar dan berizin namun juga adanya substansi tentang nilai bunga jelas dan pasti agar tidak terjadi bunga terlalu tinggi menyebabkan peminjam atau debitur tidak bisa membayar utang tersebut.

5. Penutup

Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan pembahasan tentang penyelesaian sengketa diatas maka apabila terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaiannya akan kembali ke ketentuan hukum pidana di indonesia. Maraknya kasus pinjaman online dikarenakan kurangnya peraturan perundangan Negara Indonesia yang mengatur Pinjaman Online terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya dalam ranah pidana dapat disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum yang menjadi problematika penegakan penyelesaian hukum pelanggaran-pelanggaran pinjaman online. Tidak adanya kepastian hukum juga masalah yang penting dan harus diselesaikan secepat mungkin terlebih kasus pidana yang marak sekali terjadi beberapa waktu ini. Jawaban dari rumusan masalah yang diungkapkan diatas antara lain:

Terkait dengan perlindungan hukum debitur dapat dijelaskan dalam dua bentuk yaitu legalitas dari pinjaman online agar pinjaman online dapat berjalan sesuai dengan SOP dari POJK nomor 77 tahun 2016 yang kedua perlindungan dalam bentuk penyelesaian sengketa tentang penuntutan pelanggaran pidana pinjaman online yang diselesaikan kembali pada KUHP pidana dan sekaligus menunjukkan kekosongan hukum terhadap penegakan penyelesaian pelanggaran pidana pinjaman online.

Saran

Negara Indonesia harus segera membuat peraturan yang jelas mengatur tentang pemidanaan pelanggaran pinjaman online dan peraturan tentang legalitas suatu pinjaman online bukan hanya terkait dengan terdaftar dan berizin namun juga adanya substansi tentang nilai bunga jelas dan pasti agar tidak terjadi bunga terlalu tinggi menyebabkan peminjam atau debitur tidak bisa membayar utang tersebut.

DAFTAR BACAAN

Angel fix

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet Source	3%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	alamisharia.co.id Internet Source	1%
5	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	1%
6	www.sibatakjalanjalan.com Internet Source	1%
7	jdih.tanahlautkab.go.id Internet Source	1%
8	newssetup.kontan.co.id Internet Source	1%
9	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1%

10	www.scribd.com Internet Source	<1 %
11	sikapiuangmu.ojk.go.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
14	finansial.bisnis.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
16	WWW.bbc.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.iainsurakarta.ac.id Internet Source	<1 %
18	indonesiabaik.id Internet Source	<1 %
19	portal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
20	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %

21	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
22	www.msn.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	kemenperin.go.id Internet Source	<1 %
26	pustakalegal.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
28	Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2020 Publication	<1 %
29	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
30	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
31	sef.feb.ugm.ac.id Internet Source	<1 %

32	ariskafillia.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	lbhpengayoman.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
34	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
35	www.bantuanhukum.or.id Internet Source	<1 %
36	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
37	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
38	Agus Priyonggojati. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019 Publication	<1 %
39	www.antaraneews.com Internet Source	<1 %
40	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %
41	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %

42	media.neliti.com Internet Source	<1 %
43	repository.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
44	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
45	www.liputan6.com Internet Source	<1 %
46	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
47	teraju.id Internet Source	<1 %
48	terangmitratirta1.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off